



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PELESTARIAN BUDAYA MELALUI PENGUATAN UMKM TRADISIONAL

Niken Paramita Purwanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
niken.paramita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kunjungan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, ke sentra kerajinan alat musik tradisional di Blitar pada 18 Juni 2025 menegaskan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis budaya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam kunjungan ke Budi Luhur Drums, Wakil Presiden menegaskan pentingnya menjaga serta meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global. UMKM yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya arus modernisasi. Kualitas produk menjadi faktor penentu, khususnya dalam menarik minat konsumen internasional. Hal ini berkaitan erat, tidak hanya dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan pelestarian identitas dan warisan budaya bangsa. Oleh karena itu, sinergi antara kualitas, inovasi, dan pelestarian nilai-nilai lokal menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong keberlanjutan UMKM berbasis budaya.

Budi Luhur Drums merupakan salah satu contoh UMKM yang sukses merambah pasar internasional dengan mengeksport produk kendang ke berbagai negara seperti Australia, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Malaysia. Pencapaian ini menunjukkan bahwa potensi budaya lokal memiliki daya saing di pasar dunia. Meski demikian, keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan teknologi produksi, fluktuasi pasar, serta keterbatasan akses pemasaran yang lebih luas. Penguatan sektor budaya saat ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tercermin dalam visi Presiden Prabowo yang menempatkan budaya sejajar dengan sektor-sektor strategis lainnya seperti pertahanan, ketahanan pangan, dan energi. Oleh karena itu, UMKM berbasis budaya perlu diposisikan tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam pelestarian jati diri dan warisan budaya bangsa.

Pemberian bantuan dalam bentuk mesin bor duduk dan meja gergaji merupakan wujud nyata dukungan terhadap pengembangan sektor UMKM. Bantuan tersebut layak diapresiasi sebagai langkah awal yang strategis dalam memperkuat kapasitas produksi dan meningkatkan efisiensi kerja para pelaku usaha. Kendati demikian, agar dampaknya berkelanjutan dan signifikan, dukungan semacam ini hendaknya dilengkapi dengan pendekatan yang komprehensif. Hal tersebut mencakup penyelenggaraan pelatihan yang terstruktur untuk peningkatan kualitas produk, penguatan literasi dan kapasitas pemasaran digital, serta penyediaan skema pembiayaan yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM. Pendekatan menyeluruh ini diharapkan dapat mendorong transformasi UMKM menjadi sektor yang tangguh, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah ketidakpastian dalam permintaan pasar. Muhammad Yefi Firmansyah, pemilik Budi Luhur Drums, menekankan bahwa fluktuasi permintaan merupakan bagian alami dari proses bisnis. Oleh karena itu,

kehadiran pemerintah sangat penting untuk memperluas akses pasar, misalnya melalui digital *marketing*, keikutsertaan dalam pameran berskala internasional, dan pelibatan UMKM dalam berbagai program strategis nasional. Untuk mendukung UMKM secara menyeluruh, perlu dibangun ekosistem yang kuat yang meliputi penyediaan fasilitas produksi, penguatan pemasaran, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi rakyat, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa.

Atensi DPR

Sebagai tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden Gibran terkait pentingnya peningkatan mutu produk UMKM yang berbasis budaya, Komisi VII DPR RI yang memiliki otoritas dalam bidang industri dan UMKM memegang peran penting dalam memperkuat sektor UMKM tradisional. Komisi VII DPR RI diharapkan dapat menginisiasi program-program prioritas yang mencakup penguatan kapasitas produksi, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta perluasan akses pasar melalui sinergi yang efektif dengan kementerian dan lembaga terkait. Dalam menjalankan fungsi legislasi, Komisi VII DPR RI diharapkan mampu menyusun kebijakan regulatif yang memberikan insentif kepada pelaku UMKM yang berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya nasional. Di sisi lain, fungsi pengawasan perlu dioptimalkan melalui pelaksanaan rapat kerja dan evaluasi program yang intensif, guna menjamin bahwa berbagai bentuk dukungan dari pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran, berkesinambungan, dan selaras dengan arah pembangunan ekonomi kreatif yang berlandaskan pada kekayaan budaya serta identitas bangsa.

Sumber

antaranews.com, 18 Juni 2025; dan
Koran Jakarta, 19 Juni 2025.

Minggu ke-3 Juni
(16 s.d. 22 Juni 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*